

ICMI : Sebuah Refleksi

Oleh : Ginandjar Kartasasmita

Harian Republika, 6 February 2006

ICMI adalah sebuah organisasi para cendekiawan, dan biasanya kaum cendekiawan merupakan kelompok elite dari masyarakatnya. Namun demikian sepanjang pengetahuan saya, ICMI tidaklah dimaksudkan untuk menjadi organisasi yang elitis yang terlepas dari masyarakatnya. Sebaliknya ICMI diharapkan merupakan penjelmaan dari cita-cita, harapan, dan amanat hati nurani umat Islam Indonesia. Kecendekiawanan tidak melahirkan hak, tetapi membawa kewajiban dan tanggung jawab. Kewajiban dan tanggung jawab ini bersumber dari hati nurani dan diperkuat oleh kesetiaan kepada kebenaran dan keadilan yang dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan.

Dari sudut pandang itu, dapat dipahami dan telah tercatat dalam sejarah, betapa besar peran tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin Islam dalam setiap perkembangan besar yang terjadi di tanah air. Perjuangan melawan penjajahan di berbagai penjuru Nusantara banyak dipimpin oleh dan di bawah panji-panji Islam. Sejak perang kemerdekaan sampai pada proklamasi, penyusunan UUD 1945, dan pelurusan arah perjalanan bangsa di tahun 1965/1966, dan terakhir gerakan reformasi di tahun 1998 diilhami, diprakarsai, dipimpin oleh para cendekiawan muslim dimasanya.

Indonesia sekarang sudah berada di barisan negara-negara demokrasi. Selama 8 tahun, berjalan proses perubahan terarah, yang kita sebut sebagai reformasi, dan dalam literatur sebagai proses demokratisasi. Dalam proses perubahan itu besar sekali peranan ICMI, baik sebagai organisasi maupun individu. Pemikiran-pemikiran tentang demokrasi telah berkembang dikalangan tokoh-tokoh dan aktivis muslim sejak sebelum ICMI berdiri. Adalah dengan berdirinya ICMI di tahun 1990, gagasan-gagasan dengan pemikiran-pemikiran itu menjadi memiliki kekuatan yang nyata dan melahirkan momentum yang menggerakkan proses reformasi. Sejarah menunjukkan bahwa perubahan yang mendasar dimasyarakat hanya bisa berlangsung kalau masyarakatnya sudah siap, dan khususnya proses demokrasi terjadi apabila telah terbentuk *critical mass* dari kelas menengah yang akan menjadi penggerak demokrasi. Banyak penulis mengamati bahwa pembentukan kelas menengah Islam di Indonesia ditandai oleh lahirnya ICMI. Antara lain Anders Uhlin (1997) yang mencatat bahwa "*in the 1990s, a Muslim middle class is regaining economic and political influence, a process manifested in the formation of association of Indonesian Muslim intellectuals (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI)*".

ICMI dengan cita-cita dan pemikiran memajukan Islam Indonesia sebagai sebuah kekuatan pembaruan, menampilkan Islam dalam wajah yang modern, moderat dan siap menerima gagasan baru yang membawa kemajuan dan siap bekerjasama dengan kelompok manapun. Melalui ICMI, para intelektual Islam berjuang di dalam dan di luar pemerintahan.

Pernah ada masa dimana jumlah dan kualitas keikutsertaan cendekiawan Islam dalam proses pengambilan keputusan di berbagai institusi kenegaraan tidak proporsional. Sejak ICMI berdiri, keadaan itu mulai berubah, pintu-pintu mulai terbuka bagi tokoh dan cendekiawan Muslim untuk memasuki ruangan-ruangan yang selama ini tertutup oleh kabut kecurigaan terhadap tokoh-tokoh serta kelompok-kelompok yang latar belakang atau pandangan-pandangannya bernuansa Islam.

Yang menarik juga adalah meskipun tokoh-tokoh dan cendekiawan Muslim telah banyak berada di dalam lingkaran pemerintahan, namun tatkala momentum reformasi mulai bergerak lebih cepat dipicu oleh krisis ekonomi, ICMI dan tokoh-tokoh Islam pula yang berada di depan menggerakkan roda perubahan itu.

Proses demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan relatif lancar dan aman. Dinamika politik yang menggerakkan perubahan dapat di "*harness*", sehingga perubahan itu tidaklah ditempuh melalui revolusi tetapi melalui proses konstitusional. Sejarah akan mencatat bahwa proses institusionalisasi demokrasi berlangsung dalam masa "pemerintahan ICMI", yaitu pada masa Presiden Habibie. Pada masa pemerintahan Habibie, diletakkan dasar-dasar politik tempat kita berpijak kita sekarang. Pada masa itu ditetapkan dasar-dasar hukum bagi sistem multipartai dan pemilu yang demokratis, penghormatan terhadap

hak-hak asasi manusia, pencabutan pembatasan terhadap pers, pembebasan tahanan politik, pemisahan Polisi dan TNI, desentralisasi dan otonomi daerah. Lihat saja kapan berbagai undang-undang yang melahirkan atau memperkuat institusi demokrasi; semua adalah produk tahun 1998 dan 1999; yaitu dalam waktu hanya satu setengah tahun pemerintahan Habibie. Perubahan undang-undang Dasar 1945 yang menghasilkan sistem pemerintahan kita yang demokratis sekarang adalah atas dasar pemilihan umum yang bebas yang undang-undangnya dirumuskan pada masa itu.

Alhamdulillah kita bersyukur dan boleh berbangga, bahwa sungguh besar andil para tokoh dan cendekiawan Muslim dalam membangun demokrasi yang kita nikmati sekarang.

Sebagai hasilnya, kita lihat saja keadaan sekarang: Presiden kita yang sekarang menyatakan bahwa beliau berasal dari kalangan pesantren. Wakil Presiden berasal dari keluarga yang kental keislamannya. Ketua MPR, jelas beliau tokoh ulama dan pemimpin partai Islam. Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi dan Ketua BPK, semua pemimpin lembaga tinggi negara adalah orang-orang yang latar belakang keluarga, pendidikan, orientasi politik atau kehidupan kesehariannya bernafaskan Islam. Begitu juga para Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota, Rektor di perguruan-perguruan tinggi di diseluruh tanah air, anggota-anggota DPR, DPD, DPRD mayoritasnya adalah orang-orang yang bukan sekedar Islam KTP. Saya ingat ada masa sebagian orang menghindar untuk diasosiasikan ke dalam kelompok Islam, takut dihalangi kariernya, dicurigai motivasinya atau dianggap tidak modern. Sekarang tidak ada lagi suasana seperti itu, bahkan ada kebanggaan tersendiri untuk tampil dan dikenal sebagai intelektual Islam. Lihat saja keanggotaan Majelis Pengurus ICMI sekarang yang jumlahnya ratusan dan terus bertambah karena banyaknya yang ingin turut serta.

Nah, kalau sudah begitu sekarang bagaimana? Kalau bicara dari kacamata politik, politik dalam arti kekuasaan, sudah tercapai apa yang dikehendaki. Kekuasaan politik di tanah air kita sekarang ini sebagian besar ada ditangan tokoh dan cendekiawan muslim meskipun tidak harus anggota ICMI. Pertanyaan yang sekarang ganti mengganggu hati nurani kita; adalah bahwa dalam sistem yang kita ikut membangunnya, kita berada didalamnya, bahkan memimpinnya, bagaimanakah keadaan umat dan rakyat Indonesia pada umumnya? Apakah keadaan rakyat sudah lebih baik? Atau barangkali supaya tidak terlalu berat bebannya, kita rubah pertanyaannya; apakah sistem dan kepemimpinan kita sekarang menjanjikan keadaan yang lebih baik bagi rakyat dan umat? Apakah masyarakat kita sungguh sedang menuju ke keadaan yang lebih baik?

Menurut saya persoalan utama bagi ICMI dalam masa sekarang, adalah menjawab pertanyaan itu. Akhirnya bagi kebanyakan rakyat, tanpa mengecilkan arti demokrasi dan kebebasan, ukuran yang nyata adalah perbaikan taraf hidup, yang sangat diinginkan oleh rakyat adalah kesempatan untuk hidup layak dan bermartabat.

Merupakan tanggung jawab kita sebagai cendekiawan, dan yang dijadikan tokoh dan pemimpin oleh umat untuk membuktikan sistem demokrasi pasti lebih baik dari sistem lainnya. Dan bahwa kepemimpinan yang Islami lebih baik dari yang lainnya.

Dengan bertitik tolak pada pandangan tersebut, tanggung jawab para cendekiawan dan pemimpin bangsa ke depan adalah membangun bangsa yang bermartabat, yang hidup terhormat diantara bangsa lainnya serta yang memiliki harga diri; dan sanggup membela kehormatan dan harga dirinya itu. Martabat, kehormatan dan harga diri sulit dapat tumbuh pada bangsa yang miskin yang dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang makmur; bangsa yang tergantung pada bantuan dan buatan orang lain, bangsa yang kehidupannya ditentukan oleh keputusan yang diambil oleh orang lain ditempat lain.

Singkat kata, agenda utama ICMI kedepan menurut hemat saya adalah membangun kemandirian bangsa. Konsep kemandirian bukanlah konsep keterisolasian. Kemandirian tumbuh subur dalam kondisi saling ketergantungan (interdependensi) dan saling membutuhkan, yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, baik masyarakat dalam suatu negara maupun antar bangsa. Ditengah dunia yang penuh dengan persaingan dan bebas hambatan, kita harus membangun bangsa yang mandiri dengan kekuatan yang ada pada kita. Saya yakin kekuatan itu ada dan masih dapat digerakkan. Strategi yang perlu ditempuh, menurut hemat saya, utamanya adalah melalui pembangunan sumber daya manusia sejalan dengan pembangunan ekonomi yang berbasis pada kekuatan bangsa.

Pendidikan adalah tiang utama untuk membangun bangsa yang cerdas, kreatif, produktif, dan berdaya saing. Upaya yang utama adalah dengan memberdayakan masyarakat agar mempunyai kemampuan

untuk menjangkau derajat kesehatan yang memadai dan pendidikan yang berkualitas sehingga menjadi manusia-manusia tangguh yang mandiri dan mampu bersaing. Sulit rasanya untuk merasa terhormat, kalau bangsa kita kalah dalam persaingan bukan hanya dalam bidang ekonomi atau ilmu dan teknologi, tetapi juga dalam olah raga, oleh negara-negara kecil yang jumlah penduduknya tidaklah lebih besar dari penduduk Kabupaten atau bahkan Kecamatan di Indonesia.

Kemampuan ekonomi masyarakat, dengan demikian, menjadi semakin penting untuk ditingkatkan. Tanpa itu bangsa kita akan tetap menjadi bangsa yang lemah dan menjadi permainan bangsa lain yang dewasa ini jauh lebih kuat. Kebijakan pembangunan ekonomi perlu difokuskan pada ekonomi rakyat sebagai basis dan soko guru perekonomian nasional. Kebijakan ekonomi yang berpihak pada ekonomi rakyat, yang biasanya diartikan sebagai ekonomi kecil, tidaklah berarti menafikan ekonomi besar. Justru kedua sektor ekonomi itu harus saling memperkuat, dan bukan yang besar mematikan yang kecil.

Memang ekonomi membutuhkan investasi untuk tumbuh, dan kalau kemampuan tabungan dalam negeri belum memadai harus terbuka kemungkinan dan daya tarik untuk masuknya modal dari luar negeri. Namun, hal itu bukan menjadi pembenar untuk menciptakan situasi ketergantungan pada pihak luar. Selain itu, tidak bisa lagi perkembangan ekonomi nasional disandarkan kepada hanya segelintir kelompok pemodal, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Harus diciptakan basis ekonomi yang lebih luas sehingga menjadi lebih kokoh.

Dalam upaya membangun perekonomian yang berbasis ekonomi rakyat, semua kekuatan ekonomi perlu dikonsolidasikan dan segala potensi yang kita miliki dimobilisasikan. Format ekonomi baru seyogyanya mengasumsikan sumber kekuatan ekonomi kita berasal dalam diri tubuh, alam dan budaya bangsa kita sendiri; sedangkan yang lainnya bersifat melengkapi.

Penekanan pada agenda tersebut, bukan berarti urusan kita hanya sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi skala kecil. Pembangunan hanya berhasil dalam suasana ekonomi makro yang sehat dan stabil serta tidak menguras kekayaan alam. Alam tidak boleh lagi hanya jadi perahan, kita jangan melupakan bahwa alam adalah ruang hidup karunia Allah yang harus kita jaga dan syukuri. Selain itu, meskipun reformasi di bidang politik telah cukup maju, namun tatanan politik, hukum dan pemerintahan (*governance*) harus terus diperkuat.

Tentunya agenda besar itu tidak bisa dikerjakan hanya oleh ICMI, karena ICMI bukanlah suatu lembaga yang memegang kekuasaan dan kewenangan politik pemerintahan. Akan tetapi melalui pemikiran-pemikiran dan melalui tokoh-tokohnya di pemerintah dan diberbagai institusi masyarakat, melalui kegiatan produktif para anggota, jajaran ICMI dengan berbagai kepakaran dan kecendekiawannya seharusnya dapat melanjutkan peran besarnya dalam proses reformasi, dengan kepemimpinan dan keteladanan, memberikan pencerahan dan merangsang dinamika perubahan menuju perbaikan.